



DKP Badung 'Sulap' Lahan Kosong Jadi Asri



• DOK NUSABALI

Sentra pembibitan tanaman hias di Puspem Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Badung 'menyulap' lahan kosong di sebelah selatan kompleks Puspem Badung membuahkan hasil. Lahan kosong tersebut kini menjadi lahan hijau nan asri. Tak sekedar hijau, di lahan sekitar 50 are itu DKP juga melakukan pembibitan sejumlah tanaman hias, jadi jika sewaktu-waktu ada tanaman yang perlu diganti tinggal mengambil dari sana.

Sayangnya, ketika hendak disambangi tak ada siapapun di tempat itu. Hanya ada sepda motor terparkir. Pintu pagar tertutup rapat. Meski demikian tampak dari luar aneka tanaman yang dikembang, seperti pohon perdu, bugenvil, dan masih banyak yang lain.

Kepala DKP Badung I Putu Eka Merthawan, Kamis (9/7) menyatakan, sentra pembibitan tanaman hias dulu terletak di kawasan Canggu, Kuta Utara. Namun karena pertimbangan efektifitas dipindahlah ke Puspem Badung. Karena kebetulan juga lokasi pembibitan tanaman hias tak jauh pula dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), sehingga dapat lebih berintegrasi. "Kami menginginkan hampir semua jenis tanaman hias pembibitannya dipusatkan di tempat ini. Beberapa diantaranya pohon perdu, bugenvil," ujar pejabat asal Sempidi itu. Menurut dia, ide awal pembibitan tanaman hias untuk memberikan kemudahan bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Misal, di kantor SKPD ada tanaman yang rusak tinggal ambil di pusat pembibitan tanaman hias. Begitu dengan jenis tanaman tertentu yang ada di ruas jalan protokol bila memerlukan tanaman hias maka sudah siap. "Yang terpenting hemat biaya, kan tidak usah beli lagi," kata Merthawan. Agar pembibitan tanaman hias berkelanjutan, dia memerintahkan staf di lapangan jika ada memangkas pohon jenis tertentu, batangnya bisa dibibitkan di tempat tersebut. Tempat tersebut kini dirawat khusus oleh staf DKP. "Petugas yang sebelumnya ditempatkan di Canggu juga dipindah ke sini," imbuh mantan Kabag Humas dan Protokol setda Badung itu. **as**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal : 102



Dua Rumah Sakit Pemprov Bali Proses Tender

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali melakukan proses tender terhadap dua rencana pembangunan rumah sakit di Provinsi Bali dengan dana APBD. Dua rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Internasional Provinsi Bali (RSI Bali Mandara) dan Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

Demikian disampaikan Gubernur Made Mangku Pastika disela-sela sidang paripurna penyampaian jawaban Gubernur Bali atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali, dan penyampaian Raperda Tentang Perubahan APBD 2015, dan penyampaian Raperda Pembinaan Jasa Konstruksi, di Gedung DPRD Bali, Kamis (9/7).

Dikatakannya, pembangunan Rumah Sakit Internasional Provinsi Bali ini dianggarkan untuk fisik senilai Rp 198 miliar dengan dana APBD Bali. Rencananya dalam penggarapan fisiknya nanti akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bali. Sementara untuk pengadaan alkes (alat kesehatan) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali. "Pembangunannya sekarang sedang tahapan tender. Masih dalam proses itu. Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali ini sudah dianggarkan pada APBD 2015," ujar Pastika.

Rumah Sakit Internasional Provinsi Bali yang rencananya dibangun di atas lahan Pemprov berlokasi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Sanur, Denpasar Selatan itu, berkapasitas 200 kamar. Dipe-

runtukkan untuk masyarakat pemegang kartu Jaminan Kesehatan Bali Mandara dan layanan kelas bertaraf internasional.

Sementara untuk Rumah Sakit Mata Bali Mandara, kata Pastika, juga sudah masuk dalam proses tender. Pembangunan RS mata yang diposkan pada APBD Tahun Anggaran 2015 ini sedang dalam proses pengajuan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) di Pemkot Denpasar. RS Mata Bali Mandara sebelumnya bernama Rumah Sakit Indera. "Rumah Sakit Mata Bali Mandara juga sedang pengajuan IMB dan pembangunannya dalam proses tender," kata mantan Kapolda Bali ini.

Gubernur Made Mangku Pastika yang kemarin didampingi Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, menyampaikan postur APBD Perubahan Tahun 2015. APBD Perubahan ini adalah untuk dipergunakan sebagai penambahan alokasi dana pada beberapa kegiatan dalam rangka memaksimalkan pencapaian target APBD Induk 2015.

Kemarin, terungkap APBD Induk Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar Rp 4,9 triliun, meningkat Rp 581 miliar sehingga pada APBD Perubahan Tahun 2015 menjadi Rp 5,5 triliun. Sementara raihan PAD Pemprov Bali Tahun 2015 sebesar Rp 2,9 triliun. Pendapatan target juga terjadi pada dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak serta dana alokasi khusus (DAK). **nat**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal : 2



Izin Wisata Water Sport Dipertanyakan

'Permohonannya saja belum ada masuk, apa yang kami proses. Kami belum ada keluarkan izin baik itu IMB dan izin lainnya,'

(Kepala KPT Buleleng)

SINGARAJA, NusaBali

Sarana wisata air yang berlokasi di tengah laut wilayah Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, ternyata masih berdiri kokoh. Padahal Badan Pol PP sempat

tebar peringatan keras siap membongkar jika belum kantongi izin hingga batas waktu ditetapkan.

Sementara itu, pihak investor sarana wisata air berupa water sport di kawasan Kalibukbuk itu, telah mengambil formulir perizinan yang dibutuhkan, sejak Satpol PP kabupaten turun mengecek sarana wisata tersebut. Namun hingga kini belum ada satu pun perizinan yang dikeluarkan pihak Pemkab Buleleng melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT).

Kepala KPT, Putu Karuna yang dikonfirmasi Kamis (9/7) mengaku, pihaknya belum pernah terbitkan izin terkait dengan sarana wisata air yang sudah berdiri di tengah laut di Kalibukbuk tersebut.

"Permohonannya saja belum

ada masuk, apa yang kami proses. Kami belum ada keluarkan izin baik itu IMB dan izin lainnya," aku Karuna.

Dijelaskan, ada dua jenis izin yang dibutuhkan dalam kegiatan wisata air di Kalibukbuk tersebut. Jenis izin pertama menyangkut izin mendirikan bangunan yang berada di darat. Bangunan tersebut sudah berdiri sebagai pendukung dari kegiatan wisata water sport tersebut.

Selain IMB, izin yang lainnya yang dibutuhkan adalah izin operasional dari aktivitas wisata air tersebut. Nah, soal izin aktivitas wisata air itu, pihaknya sekarang tidak memiliki kewenangan menyusul terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan laut. Dijelaskan, ke-

wenangan pengelolaan laut mulai dari bibir pantai sampai 12 mil menjadi kewenangan Provinsi.

"Kami belum keluarkan IBM atas bangunan di darat, sedangkan untuk aktivitas di tengah laut itu sekarang menjadi kewenangan provinsi, jika nanti ada permohonan yang masuk, kami akan sarankan mengurus ke provinsi. Tapi sampai saat ini belum ada permohonan izin yang masuk," ungkap Karuna.

Sementara Kepala Badan Sat Pol PP Pemkab Buleleng, I Made Budi Astawa yang dikonfirmasi terpisah mengaku, pihaknya tidak bisa menindak bangunan pendukung dari wisata sarana air itu, karena pihak investor telah mendapat izin.

"Kalau bangunan di darat

itu, sudah dapat izin, makanya kami tidak bisa menindak. Kalau yang ditengah laut, itu kan kewenangan dari provinsi," ujarnya.

Untuk diketahui, warga dan pemilik hotel curiga dengan pemasangan sarana wisata air di tengah laut tanpa izin. Wisata air itu dipasang oleh seorang bule asal Australia bekerjasama dengan warga lokal.

Pemasangan sarana wisata air itu sangat kentara dari daratan dengan jarak sekitar 100 meter. Agar sarana yang sengaja didatangkan dari luar negeri itu dihempaskan arus laut, pemiliknya pun memasang jangkar di dalam laut. Pemasangan jangkar tersebut dikhawatirkan akan merusak taman terumbu karang yang mulai tumbuh. **k19**

Edisi : Jumat, 10 Juli 2015

Hal : 4



Sekkot Denpasar

Diperiksa Kejari

★ **Terkait Dugaan Korupsi
di PD Parkir Denpasar**

Sekkot Denpasar, AAN Rai Iswara membantah dirinya diperiksa, melainkan hanya diundang untuk berbincang-bincang soal kondisi Kota Denpasar saat ini.

DENPASAR, NusaBali

Penyelidikan kasus dugaan korupsi di PD Parkir Kota Denpasar disebut Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar. Kali ini, giliran Sekretaris Kota (Sekkot) Denpasar, AAN Rai Iswara yang dipanggil terkait masalah pengelolaan parkir di PD Parkir Kota Denpasar di Kejari Denpasar, Rabu (8/7).

Kajari Denpasar, Imanuel Zebua mengatakan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap



AAN Rai Iswara

Sekkot Denpasar, Rai Iswara pada Rabu (8/7) sore. Dalam pemeriksaan tersebut, Rai Iswara didampingi Kabag Hukum, I Made Toya. "Sudah kami periksa kemarin (Rabu, red) di Kejari," jelas Zebua saat ditemui di Kejati Bali pada Kamis (9/7).

Dalam pemeriksaan ini, Rai Iswara diperiksa terkait Perda, MoU antara Pemkot Denpasar dan PD Parkir serta penggunaan rek-

ening serta aturan-aturan lainnya dalam pengelolaan parkir.

"Saya minta ketegasan kepada Sekkot sebagai eksekutif apakah penggunaan rekening ini sudah benar, apakah MoU sudah benar juga soal Perda. Jawabannya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh dan ada juga yang dijawab tidak tahu," tegas Zebua. Saat didesak terkait kesimpulan pemeriksaan Rai Iswara, dijelaskannya kebanyakan yang tidak benar alias banyak menyalahi aturan. Pasalnya, dalam pengelolaan PD Parkir itu harusnya ada Perda Pajak Parkir.

"Terutama untuk parkir pelataran yang belum ada aturannya. Karena menurut Pak Sekkot harus ada Perda yang mengaturnya," bebarnya. Terkait tidak adanya aturan tersebut, mantan Kajari Nias, Sumatera Utara ini mengatakan jika itu merupakan masalah antara eksekutif dan legislatif di pemerintahan Kota Denpasar. Ditanya apakah nantinya pemeriksaan akan mengarah kepada Walikota Denpasar, IB Rai Mantra dan anggota dewan,

Edisi : Jumeda, 10 Juli 2015
Hal : 15



Zebua mengatakan akan melihat relevansinya.

"Yang pasti nanti akan ada pendalaman soal penggunaan rekening, berapa yang harusnya masuk ke kas daerah serta tata cara pengelolaan uang di pemerintahan," pungkasnya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya oleh Kejari Denpasar, Sekretaris Kota Denpasar, AAN Rai Iswara membantah jika dirinya diperiksa. "Tidak ada pemeriksaan. Saya hanya diundang pak Kajari untuk berbincang-bincang soal kondisi Kota Denpasar. Ini biasa kita lakukan untuk koordinasi," ujar Rai Iswara lewat sambungan telepon, semalam.

Pertemuan dengan Kajari beserta sejumlah pejabat Kejari Denpasar lainnya itu berlangsung di ruangan kerja Kajari Denpasar, Imanuel Zebua sekitar pukul 15.30 Wita. "Saya kaget dikatakan diperiksa. Tidak ada saya diperiksa kemarin, yang ada itu kemarin saya ditelepon pak Syahrir Sagir di Kejari jam

setengah 4 sore. Lalu saya ke Kejari. Saya diajak bincang-bincang saja," katanya.

Dalam bincang-bincang itu memang benar ada disinggung soal kasus PD Parkir. Namun Rai Iswara mengaku dirinya tidak ada hubungan langsung dengan PD Parkir, sebab sudah ada Badan Pengawas sebagai perwakilan Pemkot di PD Parkir. "Saya tidak paham urusan teknis operasional SKPD," katanya.

"Kalau saya tahu saya jawab tahun, kalau tidak saya jawab tidak," imbuhnya. Sedangkan, pada hari yang sama, penyidik Kejari Denpasar juga melakukan pemeriksaan terhadap Kasubag Keuangan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, Ari Kusri.

Pemeriksaan ini dilakukan karena PD Parkir Kota Denpasar berada di bawah naungan Dishub Kota Denpasar.

"Kami sebelumnya juga sudah memeriksa Kadis Perhubungan Kota Denpasar," tambah Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir. **rez, n, sur**